

**SANKSI ADAT PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DI SUKU  
PASEMAH MENURUT HUKUM ADAT PASEMAH  
(Menurut perspektif UU Perlindungan anak pasal 81 dan 82, Studi Kasus di  
Kecamatan Kelam Tengah, Bengkulu)**

**Oleh :  
SHINTADILA PINASTITI  
NIM : 1914041011  
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul Sanksi Adat Pelaku Pemerksosaan Anak di Bawah Umur Di Desa Adat Pasemah Dengan Hukum Adat Pasemah (perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82). Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketimpangan dalam pemberian sanksi kepada pelaku pemerksosaan di Desa Adat Pasemah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemberian sanksi adat bagi pelaku pemerksosaan di Desa Adat Pasemah, untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerksosaan di Desa Adat Pasemah, dan untuk mengetahui kesesuaian sanksi adat untuk pelaku pemerksosaan dengan sanksi yang ada dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 81 dan 82.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dan penelitian ini dilakukan di Desa Pasemah, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan ketidak sesuaian antara sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerksosaan dengan sanksi yang ada dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 81 dan 82. Sebagian masyarakat menganggap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pemerksosaan ini tidak sesuai dengan sanksi dalam sistem hukum nasional.

**Kata Kunci** : Sanksi Adat, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerksosaan

**SANKSI ADAT PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DI SUKU  
PASEMAH MENURUT HUKUM ADAT PASEMAH  
(Menurut perspektif UU Perlindungan anak pasal 81 dan 82, Studi Kasus di  
Kecamatan Kelam Tengah, Bengkulu)**

**By :  
SHINTADILA PINASTITI  
NIM : 1914041011  
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**ABTRAC**

This thesis is entitled Traditional Sanctions for Underage Rape Perpetrators in Pasemah Traditional Village with Pasemah Customary Law (perspective of Child Protection Law Articles 81 and 82). The background of this research is the imbalance in giving sanctions to the perpetrators of rape in the Pasemah Traditional Village. The purpose of this study was to find out the system of imposing customary sanctions for perpetrators of rape in the Adat Pasemah Village, to find out the views of the community regarding the customary sanctions given to perpetrators of rape in the Traditional Village of Pasemah, and to find out the suitability of customary sanctions for perpetrators of rape with the sanctions contained in Articles 81 and 82 of the Child Protection Act.

This research is a descriptive qualitative research with data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation studies. And this research was conducted in Pasemah Village, Kelam Tengah District, Kaur Regency, Bengkulu. Based on the research that has been done, the researchers found a discrepancy between the traditional sanctions given to the perpetrators of rape and the sanctions contained in the Child Protection Act articles 81 and 82. Some people think that the customary sanctions given to the perpetrators of rape are not in accordance with the sanctions in the legal system national law.

**Keywords:** Traditional Sanctions, Child Protection Act, Rape